

**EFEKTIVITAS KEGIATAN EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)**

Ega Skriptian Kurnia, Srikandi Kumadji, Devi Farah Azizah

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
115030400111005@mail.ub.ac.id)

ABSTRACT

Community awareness to meet the subjective and objective requirements of self-registration as taxpayer is still low. Number of personal taxpayers listed at KPP Pratama of South Malang has been quite huge. The revenue of Personal Income Tax (PPh OP) must be high if all personal taxpayers are registered their tax obligation based on tax regulation. This research is therefore aimed to measure the effectiveness of extensification activity to increase the revenue of PPh OP. Research type is qualitative. Result of research indicates that extensification activity can increase the number of personal taxpayer from 2011 to 2014. The increasing number of personal taxpayers has been followed by the increasing realization of the revenue from registered PPh OP, but in 2014, the realization of the revenue from the registered PPh OP is reducing due to the effect of Government Regulation No.46/2013 which induces the fact that the realization of PPh OP revenue and its transfer into PPh revenue are considered as final. Extensification activity at KPP Pratama of South Malang is not effective. In 2014, tax extensification activity at KPP Pratama of South Malang is quite effective through Letter of Appeal.

Keyword: *Taxpayer, New Personal Taxpayer, Registered Personal Taxpayer*

ABSTRAK

Kesadaran masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak masih rendah. Semakin banyak wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dengan syarat semua wajib pajak orang pribadi terdaftar melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar itulah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengukur efektivitas kegiatan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan PPh OP. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi mampu meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar diikuti dengan meningkatnya realisasi penerimaan PPh OP Terdaftar, namun tahun 2014 realisasi penerimaan PPh OP Terdaftar mengalami penurunan dikarenakan berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 menyebabkan realisasi penerimaan PPh OP dialihkan ke penerimaan PPh bersifat final. Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Malang Selatan dikatakan masih kurang efektif. Pada tahun 2014 kegiatan ekstensifikasi perpajakan di KPP Pratama Malang Selatan cukup efektif melalui Surat Imbauan.

Kata kunci: *Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar*

PENDAHULUAN

Tujuan kemerdekaan Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD 1945 adalah menciptakan kesejahteraan sosial, oleh karena itu di dalam memenuhi tujuan tersebut negara Indonesia memerlukan dana yang besar. Penerimaan negara yang terbesar pada tahun 2013 berasal dari pajak yaitu sekitar 80% dari total pendapatan negara (Anggriawan, 2013).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam triliun rupiah)

Sumber Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014
Pajak Dalam Negeri					
1. Pajak Penghasilan	357,0	431,1	465,1	502,6	586,3
i. PPh Migas	58,9	73,1	83,5	88,7	76,1
ii. PPh Non-Migas	298,2	358,0	381,6	413,9	510,2

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, 2014

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan PPh terus meningkat dari

tahun ke tahun dan penerimaan paling besar dari PPh Non-Migas yaitu sebesar 510,2 triliun rupiah. PPh Non-Migas dapat berasal dari PPh Orang Pribadi maupun PPh Badan. Setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus mengoptimalkan penerimaan pajak terutama dari penerimaan PPh.

Usaha yang dilakukan DJP yaitu dengan melakukan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, perluasan basis pajak termasuk pada sektor-sektor yang selama ini tidak banyak digali potensinya seperti Usaha Kecil Menengah (UKM), bekerja sama dengan institusi lain, penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak, dan melakukan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah.

Data tahun 2012 dari World Bank menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia berjumlah 246 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 61,5 juta jiwa telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Namun kenyataannya jumlah Orang Pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) hanya sekitar 23,22 juta jiwa. Artinya masih terdapat kurang 38 juta jiwa yang belum memiliki NPWP (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, bahwa dari sekitar 110,8 juta orang yang bekerja, baru 24,13 juta orang yang terdaftar sebagai wajib pajak. Selanjutnya dari jumlah wajib pajak tersebut, yang membayar pajak hanya 670 ribu orang atau 2,7 persen (Budi, 2014). Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan juga menjelaskan bahwa Kota Malang memiliki jumlah pekerja aktif yaitu sekitar 660.000 orang dan yang terdaftar sebagai WP OP di KPP Pratama Malang Selatan hanya sekitar 85.000 orang. Dalam hal ini maka kegiatan ekstensifikasi perpajakan akan terus dioptimalkan.

Berdasarkan uraian tersebut membuat peneliti menarik untuk meneliti bidang perpajakan dalam kegiatan ekstensifikasi perpajakan, maka penelitian ini mengambil judul: **“Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).**

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut Adriani dalam Waluyo (2013:2), pajak adalah iuran wajib (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh OP atau Badan kepada negara menurut Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak OP atau Badan, baik tambahan ekonomis dari Indonesia maupun dari luar Indonesia untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Subjek Pajak Penghasilan

Muljono (2010:2), menjelaskan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia, baik dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar negeri dan juga warisan yang belum terbagi.

Objek Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2013:109), objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan

pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak PPh adalah penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas antara lain, gaji, honorarium, penghasilan praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan dan usaha.
- c. Penghasilan yang diperoleh atas modal ataupun investasi, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Definisi Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk pembayar pajak, pemungut pajak dan pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemindahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, menjelaskan pengertian NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Yang Wajib Memperoleh NPWP

Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, antara lain:

- a. Orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat kegiatan usaha yang tersebar di berbagai tempat.
- b. Wanita kawin yang menghendaki hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dengan suami.
- c. Wanita kawin yang menghendaki pemisahan harta dengan suami berdasarkan perjanjian tertulis.
- d. Orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha, tetapi memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Definisi Ekstensifikasi Perpajakan

Menurut PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, ekstensifikasi adalah upaya aktif yang dilakukan oleh DJP untuk menambah

jumlah wajib pajak terdaftar dan memperluas basis data perpajakan.

Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan

Menurut SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, menjelaskan bahwa KPP melakukan ekstensifikasi dengan cara:

- a. Mendatangi Wajib Pajak
- b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
- c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak

Pedoman pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan harus sesuai dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Seksi Ekstensifikasi. Indikator kinerja Utama Seksi Ekstensifikasi antara lain, (Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Seksi Ekstensifikasi, 2014) :

- a) Persentase WP Terdaftar, dapat dihitung menggunakan formula IKU sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penambahan jumlah WP terdaftar tahun berjalan}}{\text{Jumlah WP terdaftar awal tahun}} \times 100\%$$

- b) Persentase jumlah WP Baru hasil ekstensifikasi, dapat dihitung menggunakan formula IKU sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi jumlah WP baru hasil ekstensifikasi}}{\text{Rencana jumlah WP baru hasil ekstensifikasi}} \times 100\%$$

- c) Persentase jumlah penerimaan pajak dari WP Baru, dapat dihitung menggunakan formula IKU sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PPh tahun tertentu} - \text{realisasi PPh tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi PPh tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila proses dalam kegiatan tersebut memenuhi sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) (Mardiasmo, 2002:132). Efektivitas ekstensifikasi hanya melihat capaian suatu program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Rumus untuk mengukur efektivitas ekstensifikasi perpajakan adalah sebagai beriku:

$$\frac{\text{realisasi jumlah WP baru hasil ekstensifikasi}}{\text{rencana jumlah WP baru hasil ekstensifikasi}} \times 100\%$$

Sumber: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, 2014

Apabila hasil persentase yang dicapai lebih dari 100% dikatakan sangat efektif. Apabila kurang dari 60% dikatakan tidak efektif.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Ukuran Efektivitas

No	Persentase	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	91 - 100%	Efektif
3	81 – 90%	Cukup efektif
4	61 – 80%	Kurang efektif
5	<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri,1996

METODE PENELITIAN

Kasiram (2010:176) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjaring data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya.

Menurut Moleong (2014:94) penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan yaitu: pertama, penetapan fokus membatasi studi berarti bahwa dengan adanya fokus akan membatasi subjek yang akan diteliti. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi criteria masuk keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan ekstensifikasi wajib pajak KPP Pratama Malang Selatan, pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan dan efektivitas kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Malang Selatan dengan mendatangi lokasi wajib pajak, melalui pemberi kerja, surat imbauan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Moleong (2014:157), data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dengan cara hasil wawancara terhadap Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut Moleong (2014:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Menurut Sugiyono (2013:246), tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kegiatan-kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap kegiatan ekstensifikasi perpajakan dengan cara mendatangi wajib pajak, melalui

pemberi kerja/bendaharawan pemerintah dan melalui surat imbauan, analisis pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dari hasil kegiatan ekstensifikasi perpajakan, analisis pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari hasil kegiatan ekstensifikasi perpajakan dan analisis efektivitas kegiatan ekstensifikasi perpajakan wajib pajak orang pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama Malang Selatan

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan merupakan kegiatan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar dan memperluas basis data perpajakan. Upaya yang dilakukan untuk menjaring wajib pajak baru dan memperluas basis data perpajakan, pada tahun 2011, 2012, 2013 dilaksanakan Sensus Pajak Nasional (SPN) secara serentak seluruh Indonesia. Kegiatan ekstensifikasi pada tahun 2014 lebih fokus dalam menambah jumlah wajib pajak baru yang belum memperoleh NPWP.

Kegiatan ekstensifikasi yang pertama adalah dengan cara mendatangi wajib pajak. Kegiatan ini dilakukan dengan cara petugas ekstensifikasi menyusun daftar wajib pajak yang belum terdaftar namun telah memenuhi syarat subjektif dan objektif ke dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE). Petugas ekstensifikasi mendatangi lokasi wajib pajak sesuai dengan Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE). Apabila ditemukan fakta di lapangan tentang wajib pajak yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh NPWP tetapi belum memiliki NPWP, maka petugas ekstensifikasi memberikan formulir untuk pendaftaran NPWP. Kegiatan ini kurang maksimal karena kurangnya jumlah sumber daya manusia yang terjun ke lapangan, sehingga masih banyak wajib pajak potensial yang belum dapat terjangkau oleh petugas ekstensifikasi.

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang kedua adalah melalui pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara petugas ekstensifikasi melakukan koordinasi dengan pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk menyampaikan Surat Permintaan Daftar Nominatif, memberikan penjelasan prosedur pendaftaran untuk memperoleh NPWP, dan memberikan formulir pendaftaran yang diisi dan ditandatangani pengurus, pemegang saham, komisaris, dan karyawan yang memiliki penghasilan diatas PTKP tetapi belum memiliki NPWP. Petugas ekstensifikasi meneliti Daftar Nominatif dan formulir pendaftaran, serta dokumen yang disyaratkan sebagai permohonan pendaftaran wajib pajak.

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang ketiga dengan cara mengirimkan surat imbauan kepada wajibpajak. Lokasi wajib pajak yang tidak dapat dijangkau oleh petugas

ekstensifikasi akan menerima surat imbauan yang dikirim oleh petugas ekstensifikasi ke alamat wajib pajak yang telah tercantum dalam Daftar Penugasan Ekstensifikasi Surat Imbauan (DPESI) untuk segera mendaftarkan diri memperoleh NPWP.

Analisis Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan Hasil Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Tahun 2011-2014

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan mampu meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar. Berikut tabel pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan tahun 2011-2014:

Tabel 3. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar awal tahun	Penambahan Jumlah WP OP Terdaftar tahun berjalan	Pertumbuhan WP OP Terdaftar
2010	68.083	-	-
2011	74.618	6.535	9,59%
2012	79.951	5.333	7,14%
2013	84.840	4.889	6,11%
2014	90.234	5.394	6,35%

Sumber: Data Diolah, 2015

Tabel 4. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru pada KPP Pratama Malang Selatan tahun 2011-2014

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Baru	Pertumbuhan
2011	6.535	-
2012	5.333	-18,39%
2013	4.889	-8,32%
2014	5.394	10,32%

Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar awal tahun di KPP Pratama Malang Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan WP OP terdaftar tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai 9,59%, ditunjukkan dengan adanya jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar tahun berjalan yaitu sebesar 6.535. Hal ini disebabkan karena kegiatan SPN mulai dilaksanakan pada tahun 2011 dan kegiatan SPN pada tahun tersebut berhasil menjaring potensi-potensi wajib pajak orang pribadi yang belum terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan.

Pertumbuhan WP OP terdaftar pada tahun 2012 mengalami penurunan 2,45% menjadi sebesar 7,14% dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar tahun berjalan yaitu sebesar 5.333. Sedangkan WP OP terdaftar terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 6,11%, ditunjukkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar tahun berjalan sebesar 4.889. Hal ini disebabkan karena sebagian besar potensi wajib pajak orang pribadi sudah terdaftar dan memperoleh NPWP pada kegiatan

SPN tahun 2011 dan tahun 2012 sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah wajib pajak potensial yang menjadi sasaran kegiatan ekstensifikasi. Namun pada tahun 2014 pertumbuhan wajib pajak orang pribadi terdaftar mengalami kenaikan 0,24% menjadi sebesar 6,35%, dengan ditunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar tahun berjalan sebesar 5.394. Hal ini disebabkan karena mulai berlakunya SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Berlakunya Surat Edaran tersebut, maka kegiatan ekstensifikasi lebih terarah dan lebih mengutamakan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar daripada memperluas basis data perpajakan.

Selanjutnya, pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi baru dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan data yang diperoleh untuk wajib pajak pajak orang pribadi baru dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi baru tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah wajib pajak orang pribadi baru sebesar 5.333, ditunjukkan dengan pertumbuhan sebesar -18,39%. Hal ini disebabkan karena kegiatan SPN lebih mengutamakan pada upaya perluasan basis data perpajakan dan sebagian besar wajib pajak orang pribadi telah terdaftar pada kegiatan SPN pada tahun 2011. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi baru sebesar 5.394, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 10,32%. Hal ini disebabkan karena kegiatan ekstensifikasi perpajakan lebih mengutamakan penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan kesadaran masyarakat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sudah cukup tinggi.

Analisis Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Hasil Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2011-2014

Berikut tabel data pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Baru pada KPP Pratama Malang Selatan tahun 2011-2014:

Tabel 5. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Baru pada KPP Pratama Malang Selatan tahun 2011-2014 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh OP Baru	Pertumbuhan
2011	1.507.849.729	-
2012	751.077.388	-50,18%
2013	739.874.348	-1,49%
2014	5.718.016.902	672,83%

Sumber: Data Diolah, 2015

Tabel 6. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan tahun 2011-2014 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh OP Terdaftar	Pertumbuhan
2011	14.923.200.338	-
2012	16.655.189.815	11,60%
2013	18.107.453.924	8,71%
2014	12.413.736.243	-31,44%

Sumber: Data Diolah, 2015

Tabel 5 menunjukkan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi baru dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Realisasi penerimaan pada tahun 2011 hingga pada tahun 2013 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan PPh OP Baru sebesar Rp 1.507.849.729. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP Baru terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar -50,18%, dengan realisasi sebesar Rp 751.077.388. Hal ini disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi baru dari kegiatan SPN masih rendah. Selain itu, kurangnya sosialisasi KPP Pratama Malang Selatan untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya pajak dan kurangnya pelatihan tentang cara menyampaikan SPT wajib pajak orang pribadi yang baik dan benar. Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi baru terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 672,83% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 5.718.016.902. Kenaikan pertumbuhan realisasi penerimaan tersebut terjadi karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi cukup tinggi. Selain itu OP Baru yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi perpajakan mempunyai tingkat ekonomi yang cukup tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi terdaftar dapat dilihat pada tabel 6. Realisasi penerimaan PPh OP Terdaftar pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 14.923.200.338. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan PPh OP Terdaftar sebesar Rp 16.655.189.815, ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan sebesar 11,60%. Realisasi penerimaan PPh OP Terdaftar terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 18.107.453.924, dengan persentase pertumbuhan sebesar 8,71%. Realisasi penerimaan PPh OP Terdaftar terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 12.413.736.243, dengan persentase pertumbuhan sebesar -31,44%. Rendahnya persentase pertumbuhan pada tahun 2014 disebabkan oleh adanya pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berlakunya peraturan

tersebut penerimaan PPh OP dari orang pribadi yang melakuka kegiatan usaha dialihkan ke penerimaan pajak penghasilan yang bersifat final. Hal ini menyebabkan penerimaan PPh OP Terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan menurun.

Analisis Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan

Tingkat efektivitas kegiatan ekstensifikasi perpajakan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan tahun 2011-2014 sebagai berikut:

Tabel 7. Efektivitas kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2011-2014

Tahun	Rencana WP OP Baru	Realisasi WP OP Baru	Tingkat Efektivitas	Kriteria	Keterangan
2011	9.000	6.535	72,61%	Kurang efektif	Sensus Pajak Nasional
2012	8.290	5.333	64,33%	Kurang efektif	Sensus Pajak Nasioanl
2013	7.501	4.889	65,17%	Kurang efektif	Sensus Pajak Nasional
2014	5.900	109	1,84%	Tidak efektif	Mendatang Wajib pajak di lokasi wajib pajak
		611	10,35%	Tidak efektif	melalui Pemberi Kerja/ Bendahara Pemerintah
		5.029	85,23%	Cukup efektif	Surat Imbauan

Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa kegiatan ekstensifikasi perpajakan pada tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan cara Sensus Pajak Nasional kurang efektif karena tingkat efektivitas kegiatan tersebut selalu dibawah 81%. Hal ini disebabkan karena kegiatan SPN lebih mengutamakan pada perluasan basis data perpajakan. Tingkat efektivitas teringgi terjadi pada tahun 2014 melalui surat imbauan, yaitu mencapai 85,23%. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan wajib pajak orang pribadi melalui surat imbauan cukup efektif karena menunjukkan persentase tingkat efektivitas lebih dari 81%. Tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 1,84% dengan mendatangi WP di lokasi WP. Kegiatan ekstensifikasi dengan cara tersebut tidak efektif. Hal ini disebabkan jumlah basis data perpajakan yang dimiliki KPP Pratama Malang Selatan yang diperoleh dari kegiatan SPN tahun 2011 hingga tahun 2013 sudah cukup banyak, selanjutnya basis data tersebut dituangkan ke dalam DSE dan DPE sehingga jumlah wajib pajak yang tercantum dalam DSE dan DPE lebih banyak, sedangkan jumlah petugas

ekstensifikasi yang ada di KPP Pratama Malang Selatan sangat terbatas.

Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 adalah dengan cara SPN dan pada tahun 2014 dengan mendatangi WP di lokasi WP, melalui Bendaharawan Pemerintah atau Pemberi Kerja, melalui surat imbauan. KPP Pratama Malang Selatan dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan telah cukup baik sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar setiap tahunnya.
2. Pertumbuhan tertinggi jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan terjadi pada tahun 2011. Sedangkan pertumbuhan tertinggi wajib pajak orang pribadi baru terjadi pada tahun 2014.
3. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP Baru tertinggi pada tahun 2014, sedangkan pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP Baru terendah terjadi pada tahun 2012. Rendahnya pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP Baru dikarenakan setiap tahun potensi wajib pajak orang pribadi baru yang terjaring kegiatan ekstensifikasi memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP Terdaftar dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2014 pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP Terdaftar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 mengakibatkan realisasi penerimaan PPh OP dialihkan ke penerimaan PPh bersifat final.
4. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi yang dilakukan seksi ekstensifikasi perpajakan dan penyuluhan KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 dengan cara SPN yang dilakukan serentak seluruh Indonesia kurang efektif dalam menambah jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar karena lebih fokus pada perluasan basis data perpajakan. Pada tahun 2014 kegiatan ekstensifikasi lebih fokus pada penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yaitu dengan cara mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak, melalui pemberi kerja, melalui surat imbauan. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan melalui surat imbauan cukup efektif.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:

1. Jadwal kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Malang Selatan tidak teratur, sehingga petugas ekstensifikasi perpajakan melakukan kegiatan ekstensifikasi hanya sesuai dengan Daftar Sasaran Ekstensifikasi
2. Data rencana wajib pajak orang pribadi baru tidak diketahui. Hal ini dikarenakan data jumlah rencana wajib pajak orang pribadi baru sudah ditentukan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini adalah saran untuk KPP Pratama Malang Selatan:

1. Pihak KPP Pratama Malang Selatan khususnya seksi ekstensifikasi perpajakan dan penyuluhan meningkatkan kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga), seperti Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, yang bertujuan untuk memperluas basis data perpajakan dalam menghimpun wajib pajak potensial, terutama wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi.
2. KPP Pratama Malang Selatan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, melalui iklan di media elektronik maupun media cetak, sosialisasi kepada masyarakat melalui kantor Kecamatan, cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, tata cara membayar pajak, pengisian SPT yang benar, serta meningkatkan kualitas pelayanan di KPP Pratama Malang Selatan, misalnya dengan cara membuka kelas pajak.
3. Penelitian ini bisa dikembangkan dengan mencari informasi dan melakukan analisis tentang rencana jumlah wajib pajak orang pribadi baru.
4. KPP Pratama Malang Selatan tetap melakukan pengawasan internal dan memperhatikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pegawai pajak. Dengan adanya pengawasan internal maka akan terciptanya pegawai pajak yang selalu jujur dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Anggriawan, Vicky. 2013.

“Pajak Kontribusi 80 Persen Penerimaan Negara”. <http://www.aktual.co/ekonomi/0517522013-pajak-kontribusi-80-persen-penerimaan-negara->. Diakses tanggal 2 Desember 2014

Budi, Chandra. 2014.

“Agenda Pajak Menteri Keuangan”. http://www.tempo.co/read/news/2014/11/06/078619885/Agenda_Pajak_Menteri_Keuangan. Diakses tanggal 2 Desember 2014

Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996

Direktorat Jenderal Pajak. 2013.

“Kepedulian Kita Untuk Kemakmuran Bersama”. <http://www.pajak.go.id/content/kepedulian-kita-untuk-kemakmuran-bersama>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2014

Kasiram. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 20. 2013. *Per/20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per/35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. *Tantang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 2014

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor Se-51/PJ/2013 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi*.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.